



## **Kebijakan Kurikulum Di Masa Pandemi**

**Emiliya Fatmawati**

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Emiliyafatmawati858@gmail.com

### ***Abstract***

*The recent pandemic in Indonesia has been covid-19 for nearly 2 years. Looking back over the past two years, so many sectors have changed, one is education. Education certainly humanizes humans. Which means helping learners return to their content and guiding learners to live life in the future. The goals have been structured in the curriculum. Pandemics are contributing to the curriculum of individual education. Curriculum policies changed to school decentralization. Which means the school was given the authority to make the rules on its own. During the pandemic, the curriculum frees every school to perform either face-to-face or long-distance learning (PJJ). This reason is based on the area of Indonesia so that not all areas have a supporting signal in the learning process. Curriculum policies at pandemic times help encourage schools to improve the quality of learning. The change was also triggered by the different educational challenges between school and school. That's why writers talk about curriculum policies during the pandemic. The purpose of understanding the curriculum thoroughly is the concepts of the curriculum, the scope, the development of the curriculum during the pandemic and curriculum policies and its application. The method used was a qualitative approach to literature study.*

**Keywords:** *Curriculum policies, pandemics, changes*

# Kebijakan Kurikulum Di Masa Pandemi

**Emiliya Fatmawati**

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Emiliyafatmawati858@gmail.com

## *Abstrak*

Pandemi di Indonesia masih berlangsung hingga sekarang, sudah hampir 2 tahun masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan virus covid-19. Melihat 2 tahun kebelakang banyak sekali sektor negara yang berubah, salah satunya yakni pendidikan. Tujuan pendidikan tentu sangat mulia yakni memanusiakan manusia. Yang berarti membantu peserta didik untuk kembali kepada fitrahnya serta membimbing peserta didik agar dapat menjalani kehidupan di masa depan. Tujuan tersebut telah dirancang dengan terstruktur dalam kurikulum. Pandemi turut berpengaruh terhadap kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Kebijakan kurikulum berubah menjadi desentralisasi sekolah. Yang berarti pihak sekolah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan secara mandiri. Saat pandemi, kurikulum membebaskan setiap sekolah untuk melakukan proses pembelajaran baik itu tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh (pjj). Alasan ini didasari oleh luasnya wilayah Indonesia sehingga tidak semua daerah memiliki sinyal yang mendukung dalam proses pembelajaran. Adanya kebijakan kurikulum dimasa pandemi turut mendorong sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Perubahan ini juga dipicu oleh tantangan pendidikan yang berbeda antara satu sekolah dengan yang lainnya. Karena itulah penulis membahas mengenai kebijakan kurikulum di masa pandemi. Tujuannya yakni memahami kurikulum secara menyeluruh baik itu konsep kurikulum, ruang lingkup, problematika kurikulum di masa pandemi serta kebijakan kurikulum dan implemntasinya. Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif

**Kata Kunci:** Kebijakan kurikulum, pandemi, perubahan

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh *Corona Virus Disease 19*. Sebelumnya virus ini telah menyebar pertama kali di wilayah Wuhan, China. Kemudian menyebar keseluruh belahan dunia. Sebagai salah satu negara yang terdampak virus covid-19, Indonesia termasuk negara yang masih bertahan. Meskipun seluruh sektor negara mengalami perubahan secara signifikan baik itu sektor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Sektor ekonomi memegang peranan penting dalam pembangunan negara dan berimbas terhadap sektor yang lain. Seperti kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi berdampak terhadap peningkatan jumlah siswa yang putus sekolah. Hingga kini permasalahan mengenai pembelajaran jarak jauh masih menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat. Melihat kondisi sekarang masyarakat masih belum menyadari bagaimana pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan jantung negara. Sangat penting bagi negara untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berkuantitas. Tidak hanya intelektualnya saja yang bagus, namun karakternya pun harus dibentuk sedemikian rupa agar dapat menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Itulah tujuan dari pendidikan. Karena itu pemerintah Indonesia sedang mengencangkan pembentukan karakter pada diri peserta didik yang diletakkan dalam kurikulum pendidikan.

Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang telah terstruktur secara sistematis untuk mengembangkan peserta didik. Seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah berpedoman pada kurikulum, termasuk didalamnya kegiatan belajar mengajar. Kurikulum di Indonesia beberapa tahun sekali mengalami perubahan seperti dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013, kemudian diberlakukannya kurikulum 2013 revisi dan lain sebagainya. Perubahan tersebut bertujuan agar pendidikan Indonesia dapat menciptakan *output* yang berkualitas. Jika sebelum pandemi kurikulum dirubah karena pembaharuan maka di masa pandemi kurikulum pendidikan mengalami perubahan dikarenakan situasi yang terjadi. Agar pendidikan Indonesia tetap berkembang saat pandemi, pemerintah memutuskan untuk mengubah kurikulum pendidikan dan mengambil kebijakan secara cepat dan tepat yakni mengubah proses pembelajaran manual menjadi daring.

Pembelajaran jarak jauh (pjj) dijadikan sebagai solusi oleh pemerintah untuk mengatasi lonjakan dari angka covid yang semakin meninggi. Perubahan proses pembelajaran memberikan tantangan bagi dunia pendidikan seperti pembelajaran daring yang sangat bergantung pada sinyal, sehingga daerah yang jauh dari perkotaan akan mengalami kesulitan untuk belajar. Kesulitan lainnya sangat dirasakan oleh guru yakni sebagian besar guru di Indonesia terutama guru yang jauh kelahirannya sebelum millennial mengalami gagap teknologi (gaptek), dimana guru

mengalami kebingungan dalam menggunakan media pembelajaran. Padahal guru merupakan subjek pembelajaran dan memiliki tugas untuk mengawasi aktivitas peserta didik. Jika gurunya saja mengalami kebingungan dalam berinteraksi dengan teknologi maka guru tidak bisa melaksanakan tugas tersebut. Selain tantangan yang dialami oleh guru, siswa juga mengalami kesulitan yakni gagal memahami materi yang diajarkan selama pembelajaran daring, munculnya rasa malas dan kecanduan teknologi. Interaksi terus-menerus antara peserta didik dengan internet dapat menimbulkan kecanduan dalam berinteraksi dengan teknologi. Dari tantangan tersebut, maka lembaga pendidikan membutuhkan solusi agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif.

Tantangan pendidikan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, diantaranya *pertama*, Kesulitan belajar disebabkan oleh keterbatasan sinyal. Wilayah Indonesia memang luas dan membentang dari Sabang hingga Merauke. Hal inilah yang menjadi alasan sulitnya sinyal dalam pembelajaran jarak jauh. Pemerintah memberikan solusi dengan memberikan kewenangan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat termasuk didalamnya kebebasan untuk menggunakan kurikulum, bebas dalam membuat program belajar; *kedua*, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Guru dan tenaga kependidikan merupakan SDM yang harus diperhatikan dengan cermat. SDM tersebut harus dikelola secara maksimal dan sekolah perlu untuk mengembangkan profesionalitasnya. Hal ini karena kualitas SDM mempengaruhi kualitas *output*. Pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui *workshop*, pelatihan, lokakarya; *ketiga*, peserta didik mengalami kemalasan dalam belajar dan kecanduan teknologi. Guru dapat menyiapkan media belajar yang kreatif sehingga murid akan semangat dalam belajar. Sebetulnya pembelajaran daring sangat mempermudah guru dan siswa, tetapi tidak semua sekolah mendukung adanya pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan oleh kondisi lingkungan yang kurang memungkinkan seperti ketidaktersediaan sinyal, kurangnya materi pembelajaran, peserta didik tidak memahami materi pembelajaran. Alasan tersebut yang mendasari sekolah untuk tidak menerapkan proses pembelajaran jauh.

Pemerintah memberikan desentralisasi bagi setiap sekolah untuk mengatur jalannya pembelajaran. Jika seluruh sekolah melaksanakan daring, maka akan terjadi ketidakadilan bagi sekolah yang daerahnya kurang mendukung sinyal. Demikian juga dengan kurikulum pendidikan, untuk mengatasi tantangan pembelajaran saat pandemi, pemerintah memberikan 3 opsinya dan sekolah dapat menerapkan kurikulum berdasarkan ketiga opsi tersebut. Pemilihan opsi didasarkan pada alasan bahwa sekolah lebih memahami keadaan lingkungannya. Oleh karena itu, tujuan artikel ini ditulis yakni agar pembaca memahami lebih detail mengenai kurikulum dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selama masa pandemi. Berikut rumusan masalah yang ingin

dibahas yakni *pertama*, bagaimanakah konsep manajemen kurikulum?; *kedua*, bagaimanakah ruang lingkup manajemen kurikulum?; *ketiga*, bagaimana problematika pendidikan di masa pandemi?; serta *keempat*, kebijakan dan implementasi kurikulum saat pandemi?.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu metode dalam sebuah penelitian dengan memanfaatkan literatur yang ada, biasanya literatur dapat diambil dari perpustakaan, *e-book*, ataupun laman terpercaya. Untuk memenuhi kebutuhan materi, penulis menggunakan data berupa jurnal dan *e-book* dengan isi yang berkaitan dengan tema kebijakan kurikulum di masa pandemi. Dalam hal ini penulis menggunakan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti *google scholar*, *moralef*, DOAJ, serta Garuda. Sedangkan analisa data yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan demikian tahapan yang dilakukan dalam penulisan artikel berupa mendeskripsikan tantangan yang dialami pendidikan dan perubahan kebijakan kurikulum di masa pandemi.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Manajemen Kurikulum**

Perkembangan kurikulum mengikuti perkembangan teori dan prakteknya. Paradigma kurikulum pun telah berubah sejalan dengan kebijakan pendidikan yang digunakan. Dalam paradigma lama, kurikulum dapat diartikan sebagai sekumpulan pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Tercapai atau tidaknya kurikulum dalam paradigma lama itu didasarkan pada isinya. Sedangkan pada paradigma baru, Sistem Pendidikan Nasional mengartikan bahwa kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan aturan mengenai isi atau bahan pelajaran serta tata cara atau pedoman dalam penyampaian dalam proses pembelajaran (Khoruddin, 2013). Keberadaan kurikulum dalam pendidikan sangat penting. Kurikulum dapat diibaratkan seperti jantung yang mempengaruhi organ lainnya. Didalam tubuh manusia jantung menjadi organ paling vital dan memberikan energi bagi organ lainnya. Seperti itulah gambaran kurikulum dalam pendidikan. Dengan adanya kurikulum, maka tujuan pendidikan dan komponen pendidikan akan berjalan dengan lancar dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Kurikulum secara bahasa berawal dari bahasa latin yakni "*curere*" yang berarti lintasan lari. Biasanya dalam lintasan lari selalu dimulai dengan start dan diakhiri dengan finish. Begitu juga didalam dunia pendidikan, *curere* dapat diartikan sebagai bahan pembelajaran dari awal dan akhir. UU Nomor 20 tahun 2003 juga telah memberikan pengertian mengenai kurikulum yakni seperangkat rencana dan pengaturan yang didalamnya berisi tujuan, isi, dan

bahan pelajaran serta sebuah cara yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan. Sedangkan arti manajemen menurut Terry adalah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang digunakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Nasir & Rijal, 2021). Karena itulah manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian dalam kurikulum.

Kurikulum dalam prosesnya telah menempati posisi terpenting dalam lembaga pendidikan. Hal ini karena kurikulum bersifat mengarahkan seluruh kegiatan dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan. Selain memuat rencana pembelajaran, kurikulum juga memuat jenis, ruang lingkup, isi serta proses kurikulum. Kurikulum dapat dikatakan berhasil jika melibatkan masyarakat dalam seluruh programnya. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk membantu, memahami, dan mengontrol implementasi kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan dan menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan hasil kurikulum kepada pemerintah dan masyarakat luas. Sukmadinata memberikan pandangannya bahwa kurikulum dapat dilihat dari tiga dimensi (Tri Wiyanto, 2015) diantaranya *pertama*, kurikulum sebagai ilmu (*curriculum as body of knowledge*), dimana kurikulum membahas mengenai konsep, landasan, asumsi, teori, model, praksis serta prinsip-prinsip dasar mengenai kurikulum; *kedua*, kurikulum sebagai sistem (*curriculum as system*), dimana dalam hal ini kurikulum memperlihatkan kedudukannya dengan sistem dan bidang lainnya, komponen kurikulum, kurikulum dalam berbagai jalur, jenjang, jenis, dan manajemen kurikulum; *ketiga*, kurikulum sebagai rencana (*curriculum as a plan*), dimana didalam kurikulum membahas mengenai berbagai macam rencana dan rancangan atau desain kurikulum. Manajemen kurikulum dibagi menjadi dua jenis, yakni (Triwiyanto, 2015):

a. Manajemen Kurikulum Sentralistik

Manajemen kurikulum sentralistik dapat diartikan terpusat, dimana seluruh pengembangan kurikulumnya berasal dari pemerintah pusat. Tidak hanya tugas, wewenang dan tanggung jawabnya saja tetapi gagasan, inisiatif bahkan model kurikulumnya berasal dari pusat. Manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional yang digunakan oleh seluruh sekolah di setiap jenjang pendidikan. Di bawah ini penjelasan mengenai kelebihan dari manajemen kurikulum sentralistik, diantaranya:

- 1) Kurikulum bersifat seragam pada seluruh daerah dan sekolah, serta standar kemampuan dan tingkat pencapaian kemampuan dapat ditingkatkan yang berdasar pada nasional.

- 2) Memudahkan dalam hal pengendalian, pengawasan, serta evaluasi. Hal ini karena kurikulum yang digunakan seragam.
- 3) Proses pembinaan terhadap para pelaksana kurikulum lebih mudah dikarenakan pengetahuan yang dituntut sangatlah sama.
- 4) Penyediaan media dan sumber belajar lebih mudah.
- 5) Dapat memungkinkan untuk dilakukan penilaian hasil belajar secara nasional.

Sedangkan kelemahan dari manajemen kurikulum sentralistik, diantaranya:

- 1) Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan keberagaman kondisi, kebutuhan serta tingkat kemajuan. Karena itu, kurikulum sentralistik dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan nasional yang beragam.
- 2) Untuk memberikan pemahaman dan penguasaan kurikulum yang dilakukan oleh pelaksana kepada seluruh wilayah membutuhkan waktu yang cukup banyak.
- 3) Kurikulum sentralistik mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan akibat pemberlakuan satu jenis kurikulum.

#### b. Manajemen Kurikulum Desentralistik

Desentralistik secara simpel dapat diartikan dengan pelimpahan wewenang. Manajemen kurikulum desentralistik berarti proses pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada lembaga pendidikan termasuk didalamnya kegiatan desain kurikulum, pelaksanaan, serta evaluasinya dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan. Pemerintah memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengatur rumah tangganya. Dalam hal ini kegiatan penyusunan desain kurikulum desentralistik melibatkan seluruh *stakeholders*. Pengembangan kurikulum ini dapat disebut dengan pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Penyusunan kurikulum juga didasarkan pada kebutuhan, tantangan, dan juga karakteristik dimana sekolah berada, sehingga menghasilkan *output* yang sesuai dengan permintaan dunia kerja. Kelebihan kurikulum desentralistik, diantaranya:

- 1) Kurikulum yang digunakan dinilai telah sesuai dengan kebutuhan lingkungan.
- 2) Pelaksanaan kurikulum cenderung mudah, hal ini karena yang membuat kurikulum adalah guru yang ada disekolah.

Sedangkan kekurangan dari kurikulum desentralistik yakni:

- 1) Tidak semua guru memiliki kemampuan dalam menyusun kurikulum.
- 2) Lulusan kurikulum dipandang kurang mampu bersaing secara nasional.
- 3) Adanya desain kurikulum yang beragam mampu memberikan kesulitan dalam hal pengawasan dan evaluasi kurikulum.
- 4) Sulitnya proses pemindahan peserta didik dari daerah satu ke daerah yang lain.

Manajemen kurikulum desentralistik memfokuskan lembaga pendidikan untuk mandiri dalam menyiapkan, mendesain, dan mengimplementasikan kurikulum. Pemerintah hanya memberikan kerangka dasar dan struktur kurikulum selebihnya diserahkan kepada sekolah masing-masing.

Dalam implementasinya kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar dan mengajar. Mengetahui pentingnya kurikulum dalam lembaga pendidikan, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti *pertama*, adanya tingkat dan jenjang pendidikan. Perbedaan masing-masing jenjang dalam pendidikan mengakibatkan perbedaan dalam hal tujuan institusional, perbedaan isi dan struktur pendidikan, perbedaan strategi pelaksanaan kurikulum, perbedaan sarana, dan lain sebagainya; *kedua*, proses belajar mengajar. Kegiatan belajar disampaikan oleh guru, kemudian murid sebagai objek yang diberikan ilmu. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan murid saling aktif sehingga suasana belajar terasa nyaman. Dalam perjalanan kurikulum pun telah mengalami perubahan paradigma secara signifikan. Misalnya pada kurikulum 2006, guru dijadikan sebagai *center* dalam proses pembelajaran. Saat itu guru merupakan pedoman belajar yang utama, hal inilah yang menjadikan suasana belajar tidak menyenangkan. Karena komunikasi hanya terjadi dalam satu arah. Selain itu guru menjadi pihak paling aktif sedangkan murid hanya menerima. Lain halnya pada kurikulum 2013, siswa dijadikan sebagai *center* dalam pembelajaran dan diwajibkan untuk aktif baik itu aktif dalam bertanya, menyanggah atau mengemukakan pendapatnya dalam pembelajaran sehingga suasana belajar menjadi menyenangkan karena terjadi komunikasi dua arah.

Kegiatan dalam manajemen kurikulum lebih menitik beratkan pada kelancaran pembinaan dalam mengajar dan membahas mengenai isu-isu pendidikan yang berkaitan dengan guru, peserta didik, ataupun situasi dalam mengajar. Kegiatan yang berkaitan dengan guru seperti pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan tugas mengajar siswa. Keberhasilan kurikulum dapat digambarkan dari mutu pendidikan di Indonesia, bagaimana *output* sekolah dapat diterima di dunia kerja, dan beberapa penilaian lainnya. Oleh karena itu, sebelum menentukan kurikulum yang akan digunakan, sekolah perlu menganalisis terlebih dahulu mengenai kondisi-kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh pada keberhasilan kurikulum. J.G Owen memberikan pendapatnya mengenai kondisi yang perlu dianalisis kurikulumnya yakni (Nasbi, 2017):

- a. Kondisi sosiokultural. Interaksi yang erat antara sekolah dengan lingkungan, murid dengan guru, murid dengan murid merupakan kegiatan *behavioral*. Sekolah perlu menjadikan masyarakat disekitarnya sebagai narasumber. Oleh karena itu, pemimpin seyoganya

- b. memiliki kemampuan manajerial yang baik, dimana ia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitarnya.
- c. Ketersediaan fasilitas. Gagalnya perencanaan kurikulum yang sempurna biasanya terjadi karena sekolah tidak melibatkan guru dalam pembuatan kurikulum. Guru perlu diamati kesiapannya, sehingga kurikulum yang direncanakan mampu berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain melalui analisis kondisi, Keberhasilan kurikulum pendidikan juga didukung oleh peran kepala sekolah dalam memaksimalkan kurikulum, diantaranya:

- a. Keteraturan struktur
- b. Adanya fungsi pemeliharaan yang terus bertahap dari hari ke hari
- c. Adanya jaminan dalam melaksanakan pekerjaan
- d. Pemantauan terhadap hasil kerja
- e. Efisiensi (Syafaruddin & Amiruddin, 2017)

Pemimpin harus memahami konsep manajemen kurikulum sebagai modal agar paham dan adil dalam membuat keputusan. Kepemimpinan juga berkaitan dengan perilaku pribadi dan interpersonal; fokus kepada masa depan; perubahan dan pengembangan; kualitas; serta efektivitas. Berdasarkan dua hal yang telah disebutkan, maka peran kepala sekolah tentu dibutuhkan untuk dapat memaksimalkan program pembelajaran melalui kegiatan supervisi dengan tujuan untuk memantau jalannya program kegiatan.

## **2. Ruang Lingkup, Prinsip, dan Fungsi Manajemen Kurikulum**

Kurikulum merupakan program yang telah dirancang oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan. Posisi kurikulum dalam lembaga pendidikan tentu sangat penting. Kurikulum dapat dijadikan pedoman dalam hal pembelajaran. Oleh karena itu, semua lembaga pendidikan perlu memperhatikan manajemen kurikulumnya. Manajemen kurikulum menjadi bagian integritas dari KTSP dan MBS (manajemen berbasis sekolah) yang didalamnya memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada satuan jenjang pendidikan kurikulum lebih mengutamakan realisasi dan merelevansikan antara kurikulum nasional dalam bentuk standar kompetensi dengan kebutuhan daerah, sehingga terbentuklah kurikulum integritas antara peserta didik dengan lingkungan yang ada di daerah sekolah. Agar kurikulum dapat diimplementasikan secara penuh, maka dibutuhkan suatu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan manajemen kurikulum diantaranya:

- a. Produktivitas. Kurikulum harus mempertimbangkan hal yang ingin dicapai. Dalam hal ini prinsip produktivitas harus dipahami dengan baik. Bagaimana nantinya peserta didik dapat memahami pembelajaran sehingga menghasilkan *output* yang terbaik.
- b. Demokratisasi. Seluruh pelaksanaan kurikulum harus dilaksanakan secara demokrasi dan menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik sesuai dengan tugas yang diberikan secara penuh.
- c. Kooperatif. Maksudnya adalah kegiatan kurikulum membutuhkan dukungan dan kerjasama yang positif dari berbagai pihak, sehingga hasil yang didapatkan maksimal.
- d. Efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini perlu diperhatikan dengan tujuan kegiatan kurikulum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dengan penggunaan biaya, tenaga, dan waktu yang efisien.
- e. Adanya pengarahannya mengenai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Manajemen berfungsi untuk menguatkan visi, misi, dan tujuan sehingga kedudukannya menjadi kuat.

Berdasarkan pendapat G.R Terry, ia memberikan pendapatnya mengenai fungsi kurikulum, diantaranya (Komariah, 2021):

- a. Perencanaan (*planning*) merupakan pemilihan strategi, kebijakan, program, proyek, metode, sistem anggaran, dan lain sebagainya dengan tujuan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan kurikulum dapat diartikan dengan memberikan kesempatan belajar dalam arti bahwa guru memberikan pembinaan kepada peserta didik untuk merubah perilaku yang diinginkan kemudian melakukan proses penilaian. Jadi, pada perencanaan kurikulum sebaiknya dilaksanakan dengan teliti, cermat, menyeluruh, dan rinci.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan mengusahakan hubungan yang efektif antara beberapa orang, sehingga dapat bekerjasama dengan efisien serta mampu untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan tupoksi yang diberikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yakni mengetahui kapan perencanaan dilaksanakan, kapan target dilaksanakan, serta apa targetnya.
- c. Pelaksanaan (*actuating*). Dalam manajemen kurikulum fungsi ini yang paling utama, hal ini karena berhubungan secara langsung dengan orang-orang dalam organisasi.
- d. Pengawasan (*controlling*). Seluruh fungsi yang telah penulis sebutkan diatas tidak akan berfungsi jika tidak dilakukan pengawasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan akan memperlihatkan hasil akhir dan pengambilan tindakan.
- e. Pengendalian merupakan proses *monitoring*, perbandingan, dan memberikan pengoreksian mengenai kinerja dalam bekerja.

- f. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan secara kualitatif ataupun kuantitatif

Prinsip manajemen kurikulum memang perlu untuk diperhatikan, tetapi kebijakan pemerintah juga perlu diperhatikan. Manajemen kurikulum yang dilaksanakan secara optimal tentunya dapat memberikan hasil kurikulum yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan kualitas *output* yang terbaik. Karena itu, tidak heran bila lembaga pendidikan berusaha untuk meningkatkan manajemen kurikulum yang berfungsi untuk:

- a. Pemanfaatan sumber daya semakin efektif jika didukung dengan manajemen kurikulum.
- b. Memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh peserta didik agar dapat meningkatkan kualitasnya. Dalam kurikulum peserta didik sangat didukung untuk mengembangkan kemampuannya melalui kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, serta kokurikuler.
- c. Kebutuhan peserta didik semakin terpenuhi dengan adanya manajemen kurikulum. Hasil pembelajaran peserta didik dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- d. Meningkatkan efektivitas kinerja guru dan siswa. Pengelolaan manajemen kurikulum yang optimal dapat meningkatkan kinerja guru dan siswa. Dikarenakan kinerja guru meningkat maka kualitas pembelajaran juga semakin meningkat.
- e. Kurikulum yang dikelola dengan baik dapat melibatkan masyarakat dalam programnya.

### **3. Problematika Kurikulum di Masa Pandemi**

Kurikulum di Indonesia berperan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Tanpa kurikulum maka pendidikan di Indonesia tidak akan semaju sekarang, bahkan pendidikan Indonesia akan keluar dari tujuan yang ingin dicapainya. Karena itulah kurikulum harus diperhatikan secara benar terutama oleh lembaga pendidikan. Pada awal pandemi kurikulum tidak dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan. Hal ini karena kurikulum sebelum pandemi memiliki banyak kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Belum lagi dengan beberapa ujian sebagai penentu kelulusan seperti Ujian Nasional, Ujian Sekolah, dan lain sebagainya. Kondisi ini memberikan beban yang cukup berat tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga pada guru. Didukung dengan meningkatnya angka korban covid-19 memberikan dampak pada pemberlakuan pembelajaran jarak jauh yang tentunya harus memanfaatkan teknologi. Wilayah Indonesia sangat heterogen. Karena itulah pembelajaran jarak jauh tidak berjalan dengan lancar, terutama pada daerah yang jauh dari perkotaan. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni mengeluarkan kebijakan kurikulum darurat dan kurikulum merdeka.

Pada saat pandemi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya yakni menerapkan kurikulum merdeka belajar. Kurikulum saat ini telah menjadi kebebasan bagi

setiap sekolah dan sekolah diberikan desentralisasi seluas-luasnya. Yang berarti otonomi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah diatur secara penuh oleh sekolah. Kurikulum memang hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga sekolah memang perlu untuk mengenal lingkungannya dan memaksimalkan potensi peserta didik. Melalui kurikulum, peserta didik akan dibimbing dengan menyesuaikan perkembangan aspek psikologisnya. Alasannya yakni setiap peserta didik memiliki perbedaan yang signifikan dalam proses pembelajaran dan kurikulum harus merangkum perbedaan tersebut menjadi satu.

Adanya desentralisasi yang diberikan kepada pemerintahan pusat kepada sekolah mengakibatkan proses pembelajaran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan wilayah yang menyebabkan proses pembelajaran yang berbeda yakni daring dan luring. Pada pembelajaran daring atau jarak jauh, maka guru dituntut untuk kreatif dan inovatif sehingga peserta didik tetap belajar dan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan guru sebelum mengajar yaitu menyiapkan video pembelajaran, menyesuaikan materi pembelajaran dengan kompetensi dasar, dan lain sebagainya. Tantangan bagi sekolah yang mengadakan pembelajaran daring yakni sebagian besar peserta didik gagal memahami materi pembelajaran, munculnya rasa malas, serta kecanduan terhadap teknologi. Untuk mengatasi tantangan yang terjadi, pemerintah memberikan himbuan kepada guru untuk melakukan kegiatan *assesment* baik itu assesment kognitif dan non-kognitif dengan tujuan untuk mengetahui keadaan peserta didik serta perkembangan pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah diajarkan oleh guru. Hasil dari kegiatan *assesment* dapat memberikan gambaran besar mengenai kemajuan peserta didik, sedangkan untuk hasil yang belum mencapai nilai standar maka guru dapat melakukan remedial atau memberikan tambahan tugas.

#### 4. Kebijakan dan Implementasi Kurikulum Saat Pandemi

Pandemi memberikan tantangan bagi dunia pendidikan. Dimulai dari pemberlakuan untuk belajar jarak jauh, penggunaan media pembelajaran yang terus *up to date*, ketergantungan pada signal hanya untuk belajar dan lain sebagainya. Perubahan tersebut memberikan tantangan sekaligus kemajuan bagi dunia pendidikan. Tantangan yang dimaksudkan yakni bagaimana dunia pendidikan dapat beradaptasi dengan pandemi?. Mengingat pendidikan sebelumnya masih menggunakan media manual untuk pembelajaran yakni tatap muka antara guru dan peserta didik, kemudian pelayanan lembaga pendidikan pun masih menggunakan manual, adanya gptek (gagap teknologi) yang dimiliki oleh guru, sedangkan untuk kemajuan yang diberikan yakni pandemi memberikan kebermanfaatn bagi dunia pendidikan, seperti meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan

*soft skill* dari masing-masing guru dengan tujuan agar pembelajaran di masa pandemi menjadi lancar, pelayanan pendidikan pun semakin meningkat dengan memanfaatkan iptek, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa perubahan dan tantangan yang terjadi selama pandemi merupakan dampak dari kebijakan kurikulum. Selama pandemi pemerintah mengeluarkan kebijakannya dalam bidang kurikulum. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lembaga pendidikan semakin mudah mengelola rumah tangganya. Oleh karena itu berdasarkan data yang diperoleh dari laman Kemendikbud, penulis mencoba menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan kurikulum dan implementasinya selama pandemi, diantaranya:

a. Kebijakan kurikulum darurat

Pemerintah mengeluarkan kebijakan kurikulum darurat pada bulan Agustus tahun 2020, tetapi implementasi kebijakannya telah dimulai sejak bulan Mei. Kurikulum darurat dimaksudkan agar sekolah diberikan kebebasan mengenai kurikulum yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pedoman kebijakan ini didasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020. Isi dari pedoman tersebut yakni kebebasan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum. Kurikulum darurat harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekolah diberikan tiga pilihan mengenai kurikulum darurat yakni *pertama*, sekolah tetap diperbolehkan menggunakan kurikulum yang mengacu pada kurikulum Nasional; *kedua*, sekolah diperbolehkan untuk menggunakan kurikulum darurat, dimana kurikulum darurat merupakan bentuk penyederhanaan dari kurikulum nasional yang Kemendikbud berdasarkan kondisi darurat. Kurikulum darurat telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan adanya pengurangan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik maupun guru tidak akan merasa beban saat proses pembelajaran. Kurikulum darurat hanya berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat; *ketiga*, sekolah diperbolehkan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum. Pemerintah memandang bahwa sekolah sudah mengerti dan memahami kebutuhan peserta didik saat pandemi. Oleh karena itu sekolah diperbolehkan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum. Ketiga opsi tersebut hanya diberlakukan hingga akhir tahun ajaran dan syarat yang perlu diperhatikan oleh sekolah yakni siswa tidak terbebani untuk menuntaskan kurikulum dan dapat mencapai syarat kenaikan kelas maupun syarat kelulusan.

Meskipun pemerintah memberikan ketiga opsi tersebut, realitanya opsi ketiga yakni mengenai penyederhanaan kurikulum pernah dilakukan oleh pemerintah pada semua sekolah dalam berbagai jenjang pendidikan pada bulan Mei tahun 2020. Dapat dikatakan bahwa opsi tersebut telah dipergunakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi

beban belajar dan mengajar pada peserta didik dan guru. Awal pandemi covid-19 terjadi di Indonesia, angka korban yang terdampak covid-19 sangat tinggi. Pemerintah sangat berfokus pada bidang kesehatan dengan memberlakukan protokol kesehatan, wajib memakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Saat itu Indonesia memasuki masa darurat covid-19 yang berdampak pada perubahan pembelajaran dari manual menjadi modern. Dalam kondisi tersebut, pendidikan Indonesia mengalami berbagai tantangan dan kesulitan yang diakibatkan oleh pembelajaran jarak jauh. Tantangan yang dirasakan tentu masih sulitnya SDM yakni guru untuk memanfaatkan media pembelajaran berbasis iptek. Hal ini dapat terjadi karena banyak sekali guru yang mengalami gagap teknologi (gaptek). Selain itu, peserta didik turut mengalami kemalasan dalam belajar. Alasannya karena peserta didik terbiasa untuk dijelaskan oleh guru, tetapi saat pandemi peserta didik harus belajar mandiri (otodidak), serta kesulitan yang dialami oleh guru dan peserta didik yakni sulitnya mengakses internet karena kebatasan signal. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan tidak semua wilayah terjangkau oleh signal. Tantangan dan kesulitan tersebut menjadikan pembelajaran di Indonesia kurang maksimal.

Saat itu, mental manusia sedang diuji dengan banyaknya berita baik yang benar (mengenai kematian dan berita kesehatan lainnya) maupun berita hoax kian beredar dan terdengar di telinga masyarakat. Berita tersebut cenderung membuat mental manusia menjadi *down*. Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yakni pendidikan harus melakukan penyesuaian sehingga tidak membebani guru dan peserta didik. Guru tidak lagi dituntut untuk menyelesaikan seluruh materi dalam kurikulum karena itu akan membebani guru. Karenanya perubahan kebijakan ini hanya berfokus pada penguatan nilai karakter pada peserta didik dan peserta didik dianjurkan untuk terlibat dalam pembelajaran yang relevan dengan keterampilan hidup, kesehatan, dan empati. Impelementasi perubahan kebijakan tersebut yakni pemerintah melakukan penghapusan Ujian Nasional (UN), kemudian dilakukan penyesuaian ujian sekolah, serta memberlakukan proses pendaftaran secara online. Pada kebijakan ini, adaptasi guru dan peserta didik melalui pembelajaran jarak jauh sangat diperhatikan. Tujuannya agar dunia pendidikan tetap berkembang secara pesat meskipun terdampak oleh pandemi.

Setelah penyederhanaan kurikulum pada bulan Mei dan dilanjutkan dengan pemberian kebebasan melalui 3 opsi. Selanjutnya untuk melihat ada atau tidaknya ketertinggalan peserta didik sebagai akibat dari pandemi, maka pemerintah menghimbau guru agar melakukan kegiatan *assesment* diagnostik. Kegiatan *assesment* harus dilakukan secara berkala dan ditujukan untuk seluruh peserta didik. Tujuannya yakni untuk mendiagnosisi

kondisi kognitif dan non-kognitif peserta didik sebagai dampak dari pembelajaran jauh. *Assesment* kognitif yang dimaksudkan adalah pengujian kemampuan dan capaian belajar siswa. Dari hal tersebut akan terlihat hasil capaian belajar, guru dapat melakukan beberapa solusi yakni memberikan tambahan pelajaran bagi peserta didik yang tertinggal dalam memahami mata pelajaran ataupun dapat melakukan remedial melalui ulangan. Selain itu kegiatan *assesment* kognitif juga bermanfaat bagi guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat pada peserta didik. Sedangkan *Assesment* non-kognitif bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi jiwa, mengetahui kondisi keluarga peserta didik, ataupun mengetahui kesenangan peserta didik selama belajar di rumah.

b. Kebijakan merdeka belajar

Pemerintah memberikan kebebasan bagi sekolah pada setiap jenjang pendidikan untuk menentukan kurikulum mana yang akan digunakan. Kebebasan penentuan kurikulum berdampak pada munculnya kebijakan merdeka belajar yang sangat menguntungkan guru dan peserta didik. Pasalnya melalui kebijakan ini guru diberikan kebebasan untuk mengajar sesuai dengan level yang menurutnya cocok dengan peserta didik. Guru merupakan pendidik di lapangan yang tentunya mengetahui kondisi peserta didik. Yang berarti bahwa guru diberikan kebebasan dalam mengimplementasikan kurikulum melalui cara mengajarnya. Dengan adanya kebijakan ini guru dapat meningkatkan potensi serta kompetensinya. Sebetulnya kebijakan merdeka belajar ini turut dilatar belakangi oleh keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen. Kemudian didukung oleh *mindset* guru yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena itu kebijakan ini sangat cocok untuk di implementasikan pada seluruh wilayah Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang telah terstruktur secara sistematis untuk mengembangkan peserta didik. Sedangkan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta evaluasi dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian dalam kurikulum. Kurikulum dalam prosesnya telah menempati posisi terpenting dalam lembaga pendidikan. Hal ini karena kurikulum bersifat mengarahkan seluruh kegiatan dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan. Selain memuat rencana pembelajaran, kurikulum juga memuat jenis, ruang lingkup, isi serta proses kurikulum. Manajemen kurikulum dibagi menjadi dua, yakni manajemen kurikulum sentralistik, dimana seluruh pengaturan mengenai kurikulum telah diatur

oleh pemerintah pusat dan manajemen kurikulum desentralistik yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada sekolah untuk mengatur seluruh keperluan pembelajaran.

Kurikulum lebih mengutamakan realisasi dan merelevansikan antara kurikulum nasional dalam bentuk standar kompetensi dengan kebutuhan daerah, sehingga terbentuklah kurikulum integritas antara peserta didik dengan lingkungan yang ada di daerah sekolah. Pada masa pandemi, pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan yang berdampak pada pendidikan yakni pertama, kebijakan kurikulum darurat yang terjadi pada awal pandemi. Sekolah diberikan tiga pilihan mengenai kurikulum darurat yakni *pertama*, sekolah tetap diperbolehkan menggunakan kurikulum yang mengacu pada kurikulum Nasional; *kedua*, sekolah diperbolehkan untuk menggunakan kurikulum darurat, dimana kurikulum darurat merupakan bentuk penyederhanaan dari kurikulum nasional yang Kemendikbud berdasarkan kondisi darurat. Kurikulum darurat telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan adanya pengurangan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik maupun guru tidak akan merasa beban saat proses pembelajaran. Kurikulum darurat hanya berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat; *ketiga*, sekolah diperbolehkan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum. Pemerintah memandang bahwa sekolah sudah mengerti dan memahami kebutuhan peserta didik saat pandemi.

## **REFERENSI**

- Khoruddin, M. A. (2013). *Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. 24(1).
- Komariah, N. (2021). *Pengantar Manajemen Kurikulum* (Edisi I, digital ed.). Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani.
- Nasbi, I. (2017). *Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis*. Jurnal Idaarah, 1(2).
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021). *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam: Pengantar Teori dan Praktis* (Cetakan Ke). Cv. Bo' Kampong Publishing (BKP).
- Syafaruddin, & Amiruddin. (2017). *Manajemen Kurikulum* (I). Perdana Publisher.
- Tri Wiyanto, T. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. (Y. Sari, Penyunt.) Jakarta: PT. Bumi Aksara.